



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Resah, Warga Minta Kasus Jual Beli Lahan Dipercepat

Kejari Tunggu Hasil Audit

BENGKULU - Kasus dugaan jual beli lahan hibah Pemkot Bengkulu di Kelurahan Bentiring seluas 8,6 hektare, membuat warga Perumahan Kopri RT 13

Kelurahan Bentiring yang rumahnya berdiri di atas lahan hibah itu merasa resah. Sebab, mereka ingin kepastian, terkait perumahan yang mereka tempati tersebut.

Salah satu warga Perumahan Koprri yang juga menjadi saksi dalam kasus ini, Fahrizal mengatakan, masyarakat di sekitar lahan yang bermasalah tersebut sangat berharap pengusutan jual beli lahan hibah itu dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap agar pihak BPKP dapat mempercepat proses penghitungan kerugian negara tersebut.

"Kita berharap agar secepatnya pihak berwenang segera melakukan penghitungan kerugian yang ada. Semua bukti sudah diserahkan dan juga pemeriksaan saksi telah dilakukan, kita meminta agar dugaan

kasus penjualan aset Pemkot ini dapat segera diselesaikan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH, MH mengatakan bahwa secara keseluruhan tidak ada kendala dalam pengusutan ini karena semua saksi telah dimintai keterangan dan semua bukti telah disita. Bahkan berkas perkara juga sudah lengkap dan hanya tinggal menunggu perhitungan kerugian negara diselesaikan.

Namun Kajari belum dapat mengatakan kapan kepastian tersangka akan ditetapkan karena masih menunggu hasil perhitungan KN Selesai. "Semoga dalam waktu dekat ini ada perkembangan positif untuk kita memasuki proses selanjutnya," ujarnya.

Ditambahkannya, penyidik juga sudah meminta bantuan untuk mendatangkan saksi ahli keuangan dari Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan untuk dimintai keterangan. Untuk hasil

dari perhitungan dari tim appraisal Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) akan menjadi pembanding hasil audit resmi begitu juga keterangan dari saksi ahli keuangan.

Adapun beberapa fakta kasus penyimpangan lahan pemkot diantaranya, lahan seluas 62 hektar lebih dibebaskan oleh tim 9 tahun 1995 lalu. Tujuan lahan tersebut dibebaskan adalah untuk dibangun perumahan ASN Pemkot Bengkulu. Adapun luas lahan yang dibangun tersebut sekitar 12 hektar dengan jumlah rumah yang dibangun mencapai 610 unit. Tetapi beberapa rumah tidak ditempati karena rusak akibat gempa bumi, hanya 569 rumah yang ditempati.

Kemudian tahun 2015, ada masyarakat tidak bertanggung jawab menjual lahan seluas 8,6 hektar kepada pengembang perumahan. Diduga lahan tersebut dijual mulai dari Rp 150 juta sampai Rp 500 juta perhektarenya. Dimana saat ini lahan seluas 8,6 hektar sudah berdiri perumahan. (cup)